

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Evaluation Of Rural Mina Business Development Program In Konawe Selatan District

Adam Azhar Amirullah

*Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Halu Oleo Kendari
Email :teplan_adams@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta mengevaluasi PUMP Perikanan Budidaya di Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan tujuan dari program ini adalah meningkatkan kemampuan usaha pembudidaya, meningkatkan produksi perikanan budidaya, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya, penyerapan tenaga kerja, pengembangan wirausaha, memperkuat kelembagaan Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Perikanan) dan meningkatkan kualitas lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data purposive sampling dimana subyek penelitian yang dipilih adalah orang yang memahami dan mengetahui terkait program ini. Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PUMP Perikanan Budidaya efektif dan efisien karena produksi hasil budidaya meningkat dibanding sebelum adanya program ini dan adanya pendampingan oleh PPK (Penyuluh Perikanan Kontrak) yang berstatus Penyuluh Kontrak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kategori kecukupan dan perataan bisa dikatakan belum cukup karena masih sedikit kelompok saja yang memperoleh bantuan PUMP ini. Sedangkan untuk responsivitas dan ketepatan sangat baik, dimana program ini sangat direspon positif oleh kelompok pembudidaya dan tepat sasaran karena penerima bantuan adalah betul kelompok yang berprofesi sebagai kelompok pembudidaya perikanan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengembangan Usaha, Perikanan Budidaya, Pendampingan, Penyuluh

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze and evaluate PUMP for Aquaculture in Konawe Selatan District. While the aim of this program is to improve the business capacity of farmers, increase aquaculture production, increase farmers' income and welfare, absorb labor, develop entrepreneurship, strengthen institutional Pokdakan (Fisheries Cultivation Groups) and improve environmental quality. The research method used was descriptive qualitative with purposive sampling data collection techniques where the research subjects selected were people who understood and knew about this program. The focus of this research is effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The results of this study indicate that the PUMP of Aquaculture is effective and efficient because the production of aquaculture products increases compared to before the existence of this program and there is assistance by the PPK (Contract Fisheries Extension) who is the Contractor of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. For the category of adequacy and leveling it can be said that it is not enough because there are only a few groups that get this PUMP assistance. As for responsiveness and accuracy, where this program is highly responded positively by groups of farmers and on target because recipients of assistance are true groups that work as a group of fisheries farmers.

Keywords: Evaluation, Business Development, Aquaculture, Mentoring, Extension

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, tetapi dalam kenyataannya masih adanya kesenjangan sosial yang belum dapat dipecahkan. Salah satu bentuk masalah sosial yang saat ini masih mengemuka di banyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Secara umum kemiskinan ialah satu keadaan dimana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup.

Adanya data produksi perikanan Kabupaten Konawe Selatan yang menunjukkan cenderung penurunan baik di bidang perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Ini dikarenakan pengelolaan sumberdaya perikanan belum efektif. Selain itu masalah lain yang masih timbul adalah lemahnya penegakan peraturan dalam pengelolaan perikanan dalam hal ini penangkapan ikan yang berlebihan (*overfish-ing*), kerusakan habitat akibat pengelolaan yang tidak terkedali (kerusakan mangrove, lamun serta aktivitas penambangan dll), masih minimnya peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan, konflik dengan daerah yang berbatasan, dan masih kurangnya data dan informasi tentang sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan.

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya diharapkan tidak hanya fokus pada hasil

akhir yaitu produksi hasil budidaya meningkat yang berhubungan dengan tingkat pendapatan namun harus pula adanya penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya (Pokdakan) yang semula hanya kelompok-kelompok pembudidaya biasa menjadi Koperasi yang merupakan suatu wadah yang dapat memayungi semua kelompok pembudidaya dalam satu usaha sehingga pengolahan perikanan budidaya bisa lebih baik lagi.

Selain itu dengan adanya program PUMP Perikanan Budidaya ini dapat memberikan satu model program pemberdayaan dengan pendampingan yang intensif, dimana tenaga pendamping yang berasal dari tenaga penyuluh berstatus PNS/ASN maupun Tenaga Penyuluh Kontrak (Pusat dan daerah) yang di tunjuk untuk mendampingi kelompok-kelompok penerima bantuan PUMP Perikanan Budidaya mulai dari proses pembuatan rencana anggaran biaya, proses pembelajaran dana bantuan, proses produksi budidaya, penanganan pasca panen dan pelaporan hasil produksi.

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye dalam Widodo (2013) kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi disini pemerintah berhak menjalankan dan tidak menjalankan suatu kebijakan apabila terdapat permasalahan publik. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh James Anderson dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah "Serangkaian kegiatan yang mempunyai

maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. (Widoyoko, 2012 : 4)

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan melaksanakn untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan tertentu bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program (Wirawan, 2016 : 25).

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Menurut Tyler (1950) dalam Arikunto (2009: 5), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam 14 (1971) dalam Arikunto (2009: 5), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk

disampaikan kepada pengambil keputusan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi terkait dengan suatu program yang sudah ditetapkan dan informasi tersebut akan digunakan oleh pihak pengguna terkait dengan kelangsungan program berikutnya. Wujud dari hasil evaluasi adalah adanya rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan.

Menurut Arikunto (2009: 22) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu :

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

Dari berbagai definisi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Adapun tujuan sebuah evaluasi dilakukan adalah untuk mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut.

Menurut Muhajir dalam Widodo (2013:112) evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yakni dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Sedangkan menurut Laster Stewart dalam Agustino (2008:185) “evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Subarsono (2008:120), evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

- 2) Mengukur tingkat efisien suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif..
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan atau input untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi memiliki fungsi dalam analisis kebijakan menurut Dunn (2003:609), yaitu: memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi

- 1) Efektifitas
Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang

dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas yang berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter

2) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Efisiensi yang sinonim dengan rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dengan biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisien.

3) Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan 4 kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kriteria ini menekankan kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang dicapai. Misalnya kebijakan yang memadai adalah kebijakan yang memaksimalkan pencapaian tujuan dengan biaya tetap sama, meminimalkan biaya dalam mencapai tingkat efektivitas yang tetap, biaya berubah efektivitas berubah, biaya sama efektivitas tetap.

4) Perataan

Perataan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang

berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin efektif, efisiensi, dan mencukupi, namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini terjadi karena mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka, mereka yang paling tidak mampu membayar dibebani yang tidak proporsional atau mereka yang paling menerima manfaat tidak membayar ongkos.

5) Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya satu kebijakan.

6) Ketepatan

Ketepatan berkenaan erat dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang

melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dipilih untuk menggambarkan apa yang telah terjadi dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Evaluasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya di Kabupaten Konawe Selatan.

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Konawe Selatan adalah karena program bantuan PUMP Perikanan budidaya telah ada sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 kelompok-kelompok penerima bantuan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan yang dimana tiap tahunnya selalu berbeda kelompok penerimanya.

Penelitian ini berfokus pada kriteria evaluasi teori mengenai Evaluasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya menurut teori yang dikemukakan oleh William Dunn berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu peneliti juga meneliti masalah tenaga pendamping

dalam hal ini Penyuluh Perikanan Kontrak (PPK), yang merupakan tenaga pendamping untuk program PUMP.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan instrumen penelitian berupa kamera dan panduan wawancara. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Program

Program Pengembangan Kawasan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya merupakan salah satu langkah terobosan yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Pelaksana utamanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Sasaran pelaksanaan PUMP Perikanan Budidaya, yaitu: meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, dan meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional. Dalam PUMP Perikanan Budidaya fokus pada implementasi pelaksanaan program dalam hal ini

penggunaan dan pengelolaan dana bantuan PUMP.

2. Evaluasi PUMP Perikanan Budidaya

Untuk menilai dan menganalisis apakah program ini telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka peneliti menganalisis dengan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003), seperti berikut ini:

a) Efektivitas

Efektivitas suatu kebijakan atau program diukur dari apakah kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas ditinjau dari penyaluran dana bantuan PUMP yang besarnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh kelompok yang kemudian dana tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan disalurkan ke Rekening Milik Kelompok Pokdakan (Kelompok Budidaya Perikanan) yang selanjutnya di bawah pengawasan dan pendampingan dari tenaga pendamping dalam hal ini Penyuluh Perikanan Kontrak (PPK) dana tersebut dibelanjakan untuk keperluan proses produksi budidaya sesuai RAB yang telah disusun. Dapat dilihat disini bahwa penyaluran dana PUMP tersebut bisa dikatakan efektif karena tepat sasaran kelompok yang dituju dan dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak lari dari RAB yang telah disusun oleh kelompok.

Begitu pula dengan proses pendampingan oleh PPK dianggap sangat efektif karena PPK terus

memberikan bantuan dan arahan mulai dari perencanaan anggaran biaya, pembelanjaan sarana produksi budidaya, proses budidaya hingga saat panen PPK terus mendampingi kelompok dan setelah itu PPK membuat laporan tertulis yang ditujukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pemilik program.

b) Efisiensi

Dunn (2003:430) mengemukakan bahwa efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Pada implementasi dana PUMP untuk pembelanjaan sarana produksi budidaya perikanan bisa dikatakan efisiensi karena proses pembelanjaan dana tersebut sesuai dengan RAB yang telah direncanakan dan tidak ada pembelian yang diluar dari rencana yang telah di buat. Dana yang ada pada rekening kelompok dapat dimanfaatkan seefisien mungkin karena adanya pengawasan dan pendampingan dari tenaga pendamping Kelompok oleh PPK.

c) Kecukupan

Pada kriteria kecukupan menurut Dunn (2003) berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Dalam hal kecukupan dan PUMP untuk kelompok sudah dirasa cukup untuk membiaya proses budidaya selama satu musim. Namun belum cukup dana tersebut untuk keseluruhan dimana untuk mengakomodasi kelompok-kelompok perikanan budidaya di tempat lain yang

berbeda kecamatan atau berbeda jenis budidayanya.

d) Perataan

Untuk perataan bisa dikatakan dana PUMP perikanan budidaya dari Kementrian Kelautan dan Perikanan ini bisa dikatakan belum merata. Karena masih banyak kelompok-kelompok pembudidaya perikanan di tempat lain yang membutuhkan dana seperti ini. Utamanya budidaya perikanan laut seperti rumput laut dan budidaya perikanan air tawar seperti budidaya ikan masdan ikan lele. Untuk itu diharapkan ke depan dana PUMP tersebut bisa lebih besar jumlahnya sehingga lebih banyak kelompok pembudidaya perikanan yang memperoleh dana tersebut.

e) Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Adanya Progran PUMP Perikanan Budidaya tersebut sangat direspon positif oleh masyarakat terutama kelompok budidaya perikanan. Mereka beranggapan bahwa dana PUMP tersebut sangat membantu mereka dalam melakukan proses budidaya hingga panen selain dapat memproduksi hasil yang maksimal dana tersebut juga dapat mengembangkan usaha budidaya mereka dan adanya pendampingan dari tenaga PPK sehingga tujuan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

f) Ketepatan

Ketepatan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan sosial, dan

menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Masalah ketepatan Program PUMP ini bisa dikatakan tepat sasaran karena penerima dana bantuan PUMP ini betul-betul adalah kelompok pembudidaya perikanan. Kemudian dengan adanya program ini hasil produksi budidaya dan jumlah unit usaha lebih besar dari pada sebelum adanya bantuan ini.

SIMPULAN

1. Dana PUMP dapat dimanfaatkan kelompok pembudidaya perikanan secara efektif sesuai dengan rencana anggaran biaya yang disusun dan hasil produksi juga lebih meningkat dari sebelum adanya dana bantuan ini. Dan adanya tenaga pendamping PPK sangat efektif dalam memberikan arahan dalam proses budidaya.
2. Proses pemanfaatan atau pembelian Sarana Produksi dari dana PUMP tersebut sudah efisien sesuai dengan RAB
3. Dapat dikatakan cukup untuk kelompok penerima bantuan namun belum cukup untuk mengakomodasi kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang lain.
4. Dapat dikatakan belum merata dikarenakan masih banyak kelompok-kelompok pembudidaya perikanan lain yang belum memperoleh dana PUMP tersebut
5. Program ini mendapatkan respon yang positif oleh masyarakat khususnya kelompok perikanan budidaya.
6. Program dapat dikatakan sudah tepat. Dapat dilihat dari kelompok penerima

bantuan yang betul-betul adalah kelompok perikanan budidaya dan dana tersebut tepat pula dalam hal dapat meningkatkan produksi hasil budidaya.

SARAN

1. Memaksimalkan dana bantuan PUMP yang sudah ada dan juga memaksimalkan pendampingan oleh PPK sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa diperoleh.
2. Dana Program PUMP perlu ditambah sehingga kelompok-kelompok perikanan budidaya yang lain bisa juga mendapatkan dana bantuan ini, baik dana dari pusat maupun dari daerah.
3. Model pendampingan oleh PPK dari prog-ram PUMP Perikanan Budidaya ini dapat dicontoh oleh program lain karena dianggap efektif mulai dari penyusunan anggaran budidaya hingga panen.
4. Penempatan Tenaga Pendamping dapat dilakukan melalui pendampingan oleh penyuluh PNS/ASN, Penyuluh Perikanan Kontrak (PPK) kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Swadaya atau Penyuluh Perikanan Kontrak (PPK) yang diangkat langsung oleh daerah.

PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wirawan. 2016. *Evaluasi : Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indiradewi Ni Made dan Marhaeni AA. 2016. *Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan pada Masyarakat Pesisir*. Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Universitas Udayana Bali.
- Maengkom V, Rengkung L dan Loho A. 2015. *Evaluasi Pengembangan Ekonomi Nelayan Penerima Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP) di Kelurahan Tidore*. Ambon. *Jurnal ASE-Volume 11 Nomor 2A*, Juli 2015:77-78.
- Wahyuni Kukun, Hanafi I dan Saleh C. 2013. *Evaluasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Batu*. Malang. *Jurnal J-PAL* Vo. 4 No. 1, 2013. Universitas Brawijaya Malang.
- Zahara Arina dan Rosdiana Weni. 2016. *Evaluasi Program Pengembangan*

A.A.Amirullah

Kawasan MInapolitan Perikanan
Tangkap (Studi pada Paket
Pengolahan dan Pemasaran di
Kelurahan Brondong Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan.
*Jurnal Universitas Negeri
Surabaya.* Surabaya.